

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI 4 RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR

(Accountability and Transparency of Handling Operational Expense (BOS) at SMP Negeri 4 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

Oleh: Maya Kesuma Nasution^{*)}

^{*)} Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK

Accountability in financial management is indispensable for is very important, the success of an organization including in educational institutions can be measured how the institutions manage financial and human resources. Management of BOS funds are needed to determine the extent of the accountability and transparency of BOS funds in Public Junior High School 2 Rimba Melintang, Rokan Hilir. This research is a qualitative case study approach. The study population is the principal, treasurer, school committees, teachers, parents and students. methods of sampling conducted the lottery. Data were analyzed with descriptive analysis. Accountability management of school operational funds (BOS) has been done by reviewing the financial management process of the three-budgeting, financial reporting, and verification reports. BOS funds management at the Public Junior High School 4 Rimba Rokan Hilir already accountable and transparent..

Keywords: *Accountability, transparency, management, BOS fund*

PENDAHULUAN

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program nasional pemerintah dalam bidang pendidikan yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan di satuan pendidikan tingkat dasar. Melalui program ini pemerintah ingin membuktikan komitmennya terhadap jaminan hak warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan di tingkat dasar.

Sekolah menempati posisi yang paling penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, karena sekolah instansi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana. Kesalahpahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) . Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam petunjuk teknis BOS SLTP menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pihak Pengelolaan Dana BOS SLTP. Hal ini menjadi permasalahan dan dapat menimbulkan dugaan penyelewengan.

Menurut ketentuan, dana BOS dikelola oleh kepala sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjukkan sebagai administrasi yang ditunjuk sebagai dana BOS. Sekolah boleh menggunakan dana BOS tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak program dana berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah.

Setiap sekolah menerima dana BOS yang berbeda tergantung pada jumlah siswa yang berada di sekolah tersebut. Ada sekolah yang menerima dana BOS dengan jumlah yang cukup besar, namun ada pula sekolah yang menerima dana BOS yang tergolong cukup kecil. Akan tetapi, diketahui bahwa tingginya dana BOS yang diterima sekolah tidak lantas membuat sekolah tersebut memiliki kegiatan pembelajaran yang optimal.

SMP Negeri 4 Rimba Melintang merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOS dari pemerintah. SMP ini mempunyai 200 orang siswa yang terbagi ke dalam tingkatan. Sekolah ini

tentu dituntut untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien, dalam hal penggunaan dana harus transparan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Mengingat bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap tahunnya oleh pemerintah, maka harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggungjawab. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun secara akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo. 2002).

Tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP N 4 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

Aspek yang diungkapkan dan nomor pertanyaan dalam kuesioner	Responden
Pengukuran akuntabilitas	1 s.d. 11
Pengukuran transparansi	12 s.d 20

Pengukuran akuntabilitas dan transparansi didasarkan pada jawaban yang diberikan oleh responden. Setiap jawaban mewakili skor 1 sampai dengan 4. Secara keseluruhan akuntabilitas dan transparansi diukur dengan skor rata-rata dari jawaban semua responden untuk semua pernyataan. Rentang skor rata-rata berada pada rentang sebagai berikut:

Keterangan katategori akuntabel dan transparan (Santoso. 2005):

METODOLOGI PENULISAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Rimba Melintang. Penelitian ini dilakukan bulan Agustus – Desember 2016.

Responden pada penelitian ini adalah kepala sekolah yaitu 1 orang, bendahara BOS yaitu 1 orang, seluruh guru yaitu 15 orang, komite sekolah dipilih secara lotre sebanyak 4 orang, orang tua siswa dipilih 25% dari jumlah orang tua siswa. Sedangkan penentuan jumlah responden untuk siswa sama seperti halnya dengan jumlah responden orangtua siswa yaitu 25% dari jumlah siswa yang ditentukan secara lotre (Sukmadinata. 2010).

Jenis data penelitian data primer dan sekunder. Instrument yang digunakan Santoso (2005), dikembangkan berdasarkan definisi akuntabilitas finansial menurut Premchand (dalam Halim. 2002). Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.

Tabel 1. Kelompok responden penelitian dan aspek yang diungkapkan

Skor rata-rata 1= sangat tidak akuntabel dan sangat tidak transparan
 Skor rata-rata 2= tidak akuntabel, tidak transparan
 Skor rata-rata 3= akuntabel, transparan
 Skor rata-rata 4 = sangat akuntabel, sangat transparan

Analisis data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Meleong (2010), menyatakan bahwa ” analisa data kualitatif adalah

proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan oleh data". Untuk itu data-data yang terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder, maka akan diorganisir dan disusun. Setelah tersusun kemudian dilakukan penafsiran dan pembahasan terhadap data yang dikemukakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan operasional sekolah (BOS) dalam bidang pendidikan secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional dan non operasional, namun karena biaya satuan yang digunakan adalah biaya rata-rata nasional maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Secara detail beberapa jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh dana BOS sangat banyak namun diprioritaskan untuk biaya operasional non personil bagi sekolah. Biaya operasional meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, uang lembur dan pengembangan profesi guru, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru, dan lain-lain). Biaya non operasional adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) evaluasi penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana BOS yang diperoleh oleh sekolah sebagai satu-satunya sumber keuangan dalam program RKAS sebagai sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di sekolah yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah

ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Hal ini berarti sekolah sebagai instansi pendidikan wajib memberikan pertanggung jawaban kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS.

Setiap sekolah wajib menyusun RKAS sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk masa kerja satu tahun. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dilakukan dengan mengkaji dengan tiga proses pengelolaan keuangan yakni penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, dan verifikasi laporan.

1. Penyusunan anggaran

- a) Dari segi waktu pelaksanaan penyusunan anggaran, jawaban responden atas pernyataan responden atas pernyataan mengenai disiplin waktu penyusunan RAPBS pada awal tahun anggaran, jawaban responden berkisar antara "kadang-kadang terlambat" dengan nilai skor 3 dan selalu "tepat waktu" dengan nilai skor 4 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2

Tabel 2 . Disiplin Waktu Penyusunan RAPBS Menurut Para Responden

No	Responden	Responden Memberikan Jawaban				Rata-rata Skor Jawaban
		Sering Terlambat	Kadang-kadang terlambat	Selalu tepat	Tidak Memberikan Jawaban	
1.	Kepala sekolah	-	-	1	-	4.00
2.	Guru	-	3	12	-	3.80
3.	Bendahara	-	-	1	-	4.00
4.	Komite Sekolah	-	-	4	-	4.00
5.	Orang tua siswa	-	12	38	-	3.76
6.	Siswa	-	5	45	-	3.90
Jumlah		-	20	101	-	3.91

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 2 di atas menjelaskan dari segi waktu pelaksanaan penyusunan anggaran, jawaban responden atas pernyataan mengenai disiplin waktu penyusunan RAPBS pada tahun anggaran adalah kadang-kadang terlambat dengan nilai skor 3. Ini adalah pernyataan responden kepala sekolah dari ke empat sekolah yang bersedia jadi responden. Namun berbeda dari jawaban bendahara

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel di atas dari 131 orang responden 101 responden (77.09%) menilai anggaran pada awal ajaran disusun dari tepat waktu dan 20 (22.90%), responden menilai penyusun RAPBS kadang terlambat. Berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan dalam penyusunan anggaran diantaranya disebabkan keterlambatan petunjuk pelaksanaan penyusunan anggaran dari Dinas Pendidikan, terutama untuk dana yang bersumber dari APBD. Secara normatif, penyusunan anggaran harus dilaksanakan tepat waktu mengingat fungsi anggaran selain sebagai alat otorisasi belanja sekolah juga berperan sebagai alat perencana kegiatan.

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat disimpulkan dari disiplin waktu Penyusunan RAPBS menurut para responden maka proses penganggaran dana BOS pada SMA Negeri Kabupaten Rokan Hilir adalah sangat akuntabel dan

transparan karena memiliki nilai rata-rata 3.91.

Dalam proses pengambilan keputusan, pembahasan RAPBS pada umumnya dengan memadukan keinginan pihak sekolah dengan pihak komite sekolah ataupun kompromi dari keinginan pihak sekolah dengan komite sekolah. Namun di dalam prosesnya orang tua siswa tidak banyak memberikan tanggapan atas isi rancangan anggaran sekolah. Orang tua siswa pada umumnya lebih banyak memberi perhatian pada beban iuran sekolah yang harus dibayarkan. Dalam proses demikian, anggaran sekolah yang telah disusun oleh pihak sekolah bersama dengan pihak pengurus sekolah pada umumnya mudah disepakati dengan cepat.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Pelaksanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yaitu: 1) kegiatan penerimaan, 2) kegiatan pengeluaran sesuai RAPBS.

Tabel 3. Penilaian Responden Atas Keterlibatan Guru, Komite Sekolah, dan Orang Tua Siswa Dalam Proses Penganggaran Dana BOS

Unsur Pernyataan	Jawaban Responden					Jumlah
	Tidak terlibat (Skor 1)	Terlibat pasif (Skor 2)	Cukup aktif (Skor 3)	Sangat aktif (Skor 4)	Tidak memberikan Jawaban	
Keterlibatan guru dalam menyusun anggaran	-	4	4	7	-	15
Keterlibatan komite sekolah	-	-	-	4	-	4
Keterlibatan orang tua siswa	2	22	15	9	2	50

Sumber: Data Primer. 2016

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dinilai oleh responden telah melibatkan guru, komite sekolah dan orang tua siswa. Dalam keterlibatannya dalam menyusun RAPBS, 7 responden (46.67%) guru telah terlibat sangat aktif, 4 responden (100%) komite sekolah telah terlibat sangat aktif, dan 9 responden (18%) menyatakan orang tua sangat terlibat aktif dalam penyusunan anggaran dana BOS. Ini menandakan bahwa komite sekolah memiliki keterlibatan yang tinggi dalam proses penganggaran dana BOS yaitu 100%, sedangkan keterlibatan guru dan orangtua siswa masih tergolong sedang yaitu <50% pada SMP Negeri 2 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sangat aktif dalam proses penganggaran dana BOS.

2. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah diwujudkan dalam bentuk pelaporan dalam

penggunaan dana, yang bersumber dari pemerintah daerah (APBD) serta pelaporan kepala sekolah kepada komite sekolah. Laporan keuangan sekolah terdiri atas laporan rutin bulanan, triwulan serta laporan tahunan. Kegiatan pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas keterlaksanaan BOS SMA kepada pemerintah pusat dibuat oleh tim manajemen BOS SMA dan secara khusus oleh Bendahara BOS dengan pembantunya.

Penilaian pelaporan keuangan berkaitan dengan akuntabilitas didasarkan pada jawaban responden mengenai kesesuaian penggunaan dana, ketentuan dan kebutuhan. Untuk lebih jelasnya disajikan oleh Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian Responden Mengenai Kesesuaian Penggunaan Dana BOS Dengan Ketentuan dan Kebutuhan

Penilaian responden tentang kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan dan ketentuan	Jumlah
Tidak sesuai	1
Kurang sesuai	2
Cukup sesuai	92
Sangat sesuai	32
Tidak tahu	4
Jumlah	131

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah. 2016

Tabel 4 menjelaskan penilaian responden mengenai kesesuaian

penggunaan dana BOS dengan ketentuan dan kebutuhan adalah 92

orang responden (70.23%) menyatakan sudah cukup sesuai dan sudah sangat sesuai 32 orang responden (24.43%). Hal ini berarti penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 4 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sudah cukup sesuai.

3. Verifikasi Laporan

Salah satu unsur akuntabilitas adalah adanya verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh pemegang amanah

(*agent*) kepada pemberi amanah (*principal*). Komite sekolah yang bertindak sebagai *principal* memiliki kewenangan untuk memverifikasi laporan realisasi keuangan sekolah yang bertindak sebagai *agent*. Untuk lebih jelasnya ditampilkan oleh Tabel 5.

Tabel 5. Penilaian responden mengenai ketersediaan kesempatan dilakukan verifikasi atas keuangan sekolah

Unsur Pernyataan	Jawaban Responden					Jumlah
	Tidak tersedia (Skor 1)	Hanya sedikit tersedia	Cukup tersedia (Skor 3)	Selau tersedia (Skor 4)	Tidak Tahu	
Ketersediaan kesempatan dilakukannya verifikasi keuangan sekolah	5	8	91	23	3	131

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah. 2016

Tabel 5 di atas menjelaskan penilaian responden mengenai ketersediaan kesempatan dilakukan verifikasi atas keuangan dana BOS adalah 91 orang (69.47%) mengatakan cukup tersedia dan hanya 5 orang (3.82%) menyatakan ketersediaan kesempatan dilakukan verifikasi atas keuangan sekolah mengatakan tidak tersedia.

Secara umum, para pihak yang terlibat di dalam penyusunan anggaran, pelaporan keuangan dan verifikasi laporan dianggap memiliki peran penting di dalam mengupayakan penyelenggaraan pengelolaan secara akuntabel. Hal ini tercermin dari jawaban responden baik responden komite sekolah maupun responden kepala sekolah mengatakan bahwa cukup bersedia melakukan verifikasi atas keuangan dana BOS yang telah mereka terima.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan

sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. disamping itu, transparansi dapat menciptakan timbal balik antaran pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Secara normatif, ketersediaan media penyampaian informasi keuangan harus tersedia yang memudahkan para pihak berkepentingan mengaksesnya. Secara umum, penilaian responden mengenai penyampaian informasi pengelolaan dana BOS oleh sekolah disajikan oleh Tabel 6.

Tabel 6. Penilaian Responden Mengenai Penyampaian Informasi Dana BOS

Jawaban responden bahwa informasi telah disampaikan sekolah pada setiap kesempatan yang ada	Jumlah
Sangat tidak setuju (skor 1)	6
Tidak setuju (skor 2)	9

Setuju (skor 3)	89
Sangat Setuju (skor 4)	27
Tidak menjawab (tanpa skor)	0
Jumlah	131

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah. 2016

Dari Tabel 6 di atas dapat kita ketahui bahwa rata-rata nilai indeks transparansi untuk 5 (lima) sekolah adalah 3.05. Maksudnya, rata-rata nilai indeks transparansi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum pengelolaan anggaran telah diselenggarakan secara transparan.

Secara khusus telah dilaksanakan wawancara dengan para komite sekolah dan orang tua siswa mengenai dilakukan audit internal atas jawaban laporan RAPBS. Para responden mengatakan bahwa audit eksternal tidak perlu dilakukan dengan catatan apabila sekolah telah melakukan pertanggungjawaban RAPBS secara terbuka dan jelas. Disamping itu, para responden juga menyatakan bahwa pemeriksaan internal baik verifikasi oleh komite sekolah maupun aparat pemeriksaan fungsional Badan Pegawai Daerah dipandang telah cukup mewakili pemeriksaan atas pertanggungjawaban dana BOS.

Berkaitan dengan kesediaan akses informasi, kepala sekolah menyatakan bahwa cukup terdapat akses informasi mengenai pengelolaan dana BOS. Pernyataan responden kepala tersebut dikuatkan hamper oleh seluruh data responden komite sekolah dan orang tua siswa. Disamping itu, responden seluruh kepala sekolah juga menyatakan bahwa mereka telah memberikan informasi secara terbuka kepada para pihak terkait mengenai penggunaan dana BOS, dan hal ini juga dikonfirmasi positif oleh responden anggota komite sekolah. Secara normatif sekolah harus menyampaikan informasi secara terbuka mengenai dana BOS. Sekolah telah menyediakan akses informasi bagi publik berupa papan pengumuman sebagai media publikasi penggunaan dana BOS.

Secara normatif, pengambilan keputusan terkait dengan dana BOS selalu diawali dengan komunikasi diantara pihak

terkait. Proses komunikasi akan mengurangi ketidakseimbangan informasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dalam hal ini seluruh responden, kepala sekolah yang juga dikuatkan oleh responden komite sekolah menyatakan komunikasi telah dilakukan cukup baik diantara pihak berkepentingan dengan pihak sekolah. Komunikasi telah dilakukan secara intensif antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah.

KESIMPULAN

Peneitian ini dapat disimpulkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 4 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sudah akuntabel dan transparan.

Kepala Sekolah dan manajemennya diharapkan sekiranya dapat lebih meningkatkan transparan pengelolaan dana BOS menjadi sangat transparan. Misalnya dengan menggunakan sarana prasarana media online untuk mempublikasikan.

REFERENSI

- Direktorat Pembina SMP. 2015. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Maleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rasdakarya. Bandung
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Press. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan dan*

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013. Jakarta

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.* Jakarta

Sukmadinata, N. S. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan.* Remaja Rosadakarya. Bandung

